

**KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN PADA AKAD *MUDHARABAH*
(Studi di Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi II pada Jurusan Magister Ilmu
Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

**ARINTA DEWI PUTRI
R100186002**

**PRIGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN PADA AKAD MUDHARABAH
(Studi di Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARINTA DEWI PUTRI

R100186002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing I



Wardah Yuspin, S. H., M.Kn.,Ph.D

NIDN. 0618078002

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

NIDN. 0605056301

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN PADA AKAD
MUDHARABAH**

Oleh:

ARINTA DEWI PUTRI
R100186002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Magister Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Maret 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. Wardah Yuspin, S. H., M.Kn.,Ph.D
(Ketua Dewan Penguji) | () |
| 2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Direktur,




Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
NIP. 196205141985031003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Maret 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arinta Dewi Putri', written in a cursive style.

Arinta Dewi Putri

KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN PADA AKAD *MUDHARABAH* (di Surakarta)

Abstrak

Transaksi *mudharabah* merupakan transaksi yang berbasis kerjasama. Apabila transaksi ini diterapkan dalam transaksi perbankan syariah dimana dalam transaksinya diharuskan ada jaminan yang menjadi dasar dikabulkan atau tidak proposal pembiayaan *mudharabah* tersebut akan terdapat beberapa ketidaksesuaian antara praktik dan teori yang ada. Artikel ini bertujuan untuk mencari solusi bagaimana seharusnya hukum jaminan dan eksekusi yang paling tepat diberlakukan untuk transaksi keuangan berbasis syariah. Artikel ini disusun dengan menggunakan tiga metode, yang pertama studi kepustakaan, kedua dengan wawancara dan observasi di Kantor Afta&Brother dan BNI Syariah Surakarta. Langkah ketiga pendekatan Takwil, dimana dengan menafsirkan ayat alquran berdasarkan akal yang bertujuan untuk menyingkap makna yang terkandung di dalam suatu teks serta memilih yang tepat. Temuan didalam artikel ini adalah bahwa perlu dilakukan suatu perbaikan sistem jaminan berbasis syariah dimana jaminan tidak lagi berdasar pada jaminan kebendaan akan tetapi jaminan yang berbasis pada kemampuan membayar dari nasabah. Kemampuan membayar tersebut tidak harus selalu dibuktikan dengan jaminan kebendaan tapi bisa diwujudkan dengan reputasi nasabah di masyarakat yang bisa dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari tokoh masyarakat atau tokoh agama tentang kredibilitas dan akuntabilitas nasabah. Hal ini bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa perlu adanya suatu sistem jaminan berbasis syariah yang kompatibel untuk diterapkan pada sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Jaminan Mudharabah, dan Perbankan Syariah

Abstract

Mudharabah transactions are cooperation-based transactions. If this transaction is applied in Islamic banking transactions where in the transaction there is a requirement that there is a guarantee that is the basis for whether or not the mudharabah financing proposal is submitted there will be some discrepancies between the existing practice and theory. This article aims to find a solution to how the guarantee and execution law should be most appropriate for sharia-based financial transactions. This article is compiled using three methods, the first is literature study, secondly with interviews and observations at the Afta & Brother Office and BNI Syariah Surakarta. The third step is the Takwil approach, where by interpreting the Qur'anic verses based on reason that aims to reveal the meaning contained in a text and choose the right one. The finding in this article is that it is necessary to improve the Sharia-based guarantee system where guarantees are no longer based on material guarantees but guarantees based on the ability to pay from customers. The ability to pay does not have to always be proven by material security but can be realized by the reputation of the customer in the community which can be proven by written statements from community leaders or religious leaders about the customer's credibility and accountability. This can be an input for policy makers that there is a need for a compatible sharia-based guarantee system to be applied to the sharia financial system.

Keywords: *Mudharabah*, Guarantees, Institutionalization of sharia guarantees, execution of guarantees, *mudharabah* disputes

1. PENDAHULUAN

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Pengertian *Mudharabah* menurut Fatwa tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Mudharabah adalah kontrak di mana bank menyediakan dana kepada pengusaha (perusahaan) untuk berinvestasi dalam usaha bisnis untuk berbagi keuntungan dan kerugian dalam proporsi (nisbah) yang disepakati.¹ *Mudharabah* menurut para fuqaha adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²

Dalam pembahasan mengenai mudharabah ini tidak lepas dari adanya 4 pengaruh mazhab besar. Berbagai istilah telah digunakan untuk mudharabah (bagi hasil) seperti *muqaradah* yang biasa digunakan oleh para ulama Hanafi & Hambali dan *qirad* digunakan oleh para ulama Maliki & Shafii. Dengan dasar dan alasan yang berbeda, masing-masing mazhab memiliki beberapa perbedaan dalam menyikapi suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah mengenai adanya jaminan dalam akad mudharabah. Menurut Mazhab Hanafi dalam perjanjian *Mudharabah* tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan.³

Namun di perbankan syariah masih menerapkan adanya jaminan didalam pembiayaan mudharabah. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerja sama *Mudharabah* mengingat hal ini sama-sama menyertakan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi *Mudharabah* terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya.⁴ Karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak

¹Muhaimin, S. (2018). Teknik Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada. 40;

Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35.

²Shaharuddin, A. (2010). A study on Mudarabah in Islamic law and its application in Malaysian Islamic banks.;

Zain, M. N. M., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., Zakaria, Z., & Ghani, N. A. R. N. A. (2014). Gold Investment Application through Mudarabah Instruments in Malaysia: Analysis of Gold Dinar as Capital. *Asian Social Science*, 10(7), 173;

³Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35.349 – 358

⁴Shaikh., & Ahmed, S. (2011). A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking & Finance*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1930173>

mencerminkan nilai *Mudharabah* yang sesungguhnya.⁵ Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan *shariah compliance* dalam sistem dan operasionalnya.⁶

Imam Syafi'i dan malik mengungkapkan adanya jaminan membuat akad mudharabah lebih terlihat seperti akad rahn (gadai), dimana barang milik seseorang digadaikan untuk dijadikan pinjaman uang yang apabila terjadi gagal barang maka barang gadai akan diambil oleh pihak pegadaian. Sehingga seharusnya bank syariah dalam mengimplementasikan akad mudharabah hendaknya tidak mensyaratkan jaminan kebendaan sebagai syarat dikabulkan atau tidaknya pembiayaan tersebut seperti yang selama ini berlaku secara umum di bank syariah di Indonesia.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan jaminan pada akad *Mudharabah*? (2) Bagaimana konsep pelembagaan jaminan pada akad *Mudharabah*?

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode empiris dengan tiga tahapan. Tahap pertama yaitu menggunakan penelusuran normatif dengan penelusuran kepustakaan mengenai konsep mudharabah. Tahap kedua dilakukan dengan cara melakukan wawancara di lapangan secara empiris untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan akad mudharabah di bank syariah. Wawancara dilakukan pada Bank BNI Syariah dan Kantor Afta and Brother, dimana diharapkan hasil wawancara akan memberikan suatu pencerahan terhadap permasalahan yang ada. Tahap terakhir adalah melakukan rekonstruksi hukum mengenai konsep akad pembiayaan berbasis mudharabah dengan menggunakan pendekatan Takwil. Takwil adalah mengalihkan makna dari yang meragukan atau membingungkan pada makna yang meyakinkan dan menentramkan. Tahap

⁵Hulam, T. (2010). Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. Jurnal mimbar hukum. XXII(3) 530)

⁶Zainol, Z., & Kassim, S. (2012). A critical review of the literature on the rate of return risk in Islamic banks, Journal of Islamic Accounting and Business Research, 3(2), 121-137.

⁷Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. Procedia Economics and Finance, 35, 350.

metode takwil untuk menyelesaikan masalah dengan mengkaji ayat al-qur'an dan pendalaman makna.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan jaminan pada akad Mudharabah

Menurut Bank Indonesia dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah sejak tahun 2009-2018, dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* (jual beli), sedangkan akad *mudharabah* masih menunjukkan porsi yang kecil. Secara teori seharusnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan, karena pada dasarnya pembiayaan inilah yang dianggap paling sesuai dengan semangat yang ada pada ekonomi Islam.⁹ Padahal seperti kita ketahui bahwa konsep keuangan dalam Islam adalah bagi hasil dimana dalam hal ini konsep *Musyarakah* dan *Mudharabah* lah wujud dari konsep bagi hasil tersebut.

Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad yang memiliki resiko yang tinggi.¹⁰ Kendati memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional dengan basis hutang, terdapat jumlah yang sangat kecil apabila melihat presentase pembiayaan mudharabah, yakni hanya 5,92% (OJK, 2017) apabila dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan bank syariah. Adapun pembiayaan yang masih favorit untuk bank syariah adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, yang merupakan akad berbasis hutang, yakni mencakup 54,11% dari total pembiayaan bank syariah di Indonesia (OJK, 2017).¹¹

Menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan nasabah jarang menggunakan skim mudharabah. *Pertama*, karena hasil dari pembiayaan mudharabah yang tak pasti. Artinya tingkat kepastian dari hasil pembiayaan ini tergantung dari mudharib atau nasabah, karena shahibul mal yang telah membuat perjanjian diawal hanya menunggu laporan bisnis dari mudharib. *Kedua*, jika bisnis mengalami kenaikan maka profit yang diperoleh dalam jumlah besar. Namun sebaliknya

⁸Faris, S. (2018). Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern). XVII(1), 12.

⁹Annisa Masitha, SME Account Officer. Bank BNI Syariah KC Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Jumat, 19 Juli 2019. Pukul 15.35 WIB.

¹⁰ Ismail, R. (2014). An Optimal Risk-return portofolio of Islamic banks. *Humanomics*, Vol 30 Iss 4

¹¹ <http://www.iec-febui.com/mudharabah-sebuah-dilema/> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 08.06 WIB.

apabila bisnis sedang krisis atau mengalami penurunan maka keuntungan yang diperoleh juga akan menurun.¹²

Pengaturan mengenai mudharabah di Indonesia dapat ditemukan pada fatwa DSN MUI Nomor 7 tahun 2000. Meskipun fatwa tidak terdapat dalam susunan tata aturan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011, namun aturan yang ada dalam fatwa berisi definisi mudharabah telah di adopsi dalam Pasal 1 (25a) UU perbankan syariah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Sehingga mudharabah merupakan bentuk pembiayaan berbasis pada bagi hasil menurut UU tersebut¹³

Bank BNI Syariah KC Surakarta pernah menggunakan jaminan berupa intangible asset pada pembiayaan *murabahah* berupa personal/company guarantee dan diikat dengan fidusia. Sebagai contoh: X melakukan peminjaman di bank syariah untuk membuka usaha baru dan orang tua X sebagai pengusaha sukses yang juga menjadi nasabah dari bank syariah tersebut, maka orangtua X tsb digunakan sebagai jaminan untuk penguat atau untuk meyakinkan pihak pemutus untuk melakukan pencairan dana. Intangible asset diperkuat dengan adanya surat pernyataan dibawah tangan. Namun intangible asset tersebut hanya digunakan sebagai penguat saja dan tak ada yang bisa di eksekusi. Personal guarantee atau intangible asset sebagai penguat analisa, memperkuat usulan pemutus ke pusat.¹⁴

Dalam prakteknya sendiri di Perbankan Syariah Indonesia masih menggunakan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaan mudharabah. Sedangkan jika dilihat dari esensi akad mudharabah sendiri yang mana merupakan akad kerjasama, tidak etis apabila tetap dibebankan jaminan sebagai syarat dikabulkan atau tidaknya pembiayaan tersebut oleh shahibul mal. Karena pada prinsipnya mudharib dan shahibul mal sama-sama menyertakan modal. Mudharib sebagai pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya, sedangkan shahibul mal sebagai penyalur modal untuk bisnis tersebut.

¹² <https://www.dakwatuna.com/2014/04/16/49721/mengapa-pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah/amp/> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 07.55 WIB.

¹³ UU No. 21/ 2018 tentang perbankan syariah

¹⁴ Tommy Adityo Murti, Remedial and Recovery Head. *Wawancara Pribadi*. Jumat, 02 Agustus 2019 pukul 14.30 WIB

Adapun alasan lembaga keuangan syariah membebankan jaminan ,yaitu urgensi beban jaminan sesungguhnya digunakan sebagai pengaman bagi Shahibul mal apabila mudharib wanprestasi, karena dana yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* merupakan dana pihak ketiga (bank sebagai lembaga intermediasi).¹⁵

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Mhd.Yadi Harahap menunjukkan pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan mudharabah dilakukan untuk menghindari *character risk* dari mudharib berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 105/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musharakah, dan Wakalah bil istitmar.¹⁶

Pada BNI Syariah dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan jaminan fix asset, ada tanah atau bangunan rumahnya yang diikat dengan Hak Tanggungan. Dan fungsi dari pemberian jaminan tersebut adalah sebagai pengaman apabila nasabah melakukan wanprestasi. Kalau posisi jaminan dari fisiknya tetap dikuasai oleh Mudharib, dari Shahibul mal hanya menguasai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan tanah. Apabila nasabah wanprestasi langkah terakhir dari bank melakukan penjualan dapat melalui lelang atau dijual bawah tangan kalau nasabah tidak kooperatif.¹⁷

Dasar Bank BNI Syariah untuk melakukan lelang masih menggunakan hukum positif yang berlaku yaitu Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, yang berbunyi “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Apabila nasabah wanprestasi selama 3 bulan atau 3x nunggak, maka shahibul mal berhak melakukan eksekusi lelang, karena di akad yang disepakati mudharib sudah tertulis apabila mudharib wanprestasi maka shahibul mal berhak melakukan pelelangan atas jaminan yang dijaminan.¹⁸

Pandangan hukum positif mengenai pembebanan jaminan pada akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia adalah bahwa pengaturan yang ada terkait dengan pembebanan

¹⁵ Annisa Masitha, SME Account Officer. Bank BNI Syariah KC Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Jumat,19 Juli 2019. Pukul 16.00 WIB

¹⁶ Sidang terbuka Mhd. Yadi Harahap, Doktor FH UI. <http://law.ui.ac.id> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 08.31 WIB.

¹⁷ Tommy Adityo Murti, Remedial and Recovery Head. *Wawancara Pribadi*. Jumat, 02 Agustus 2019 pukul 14.35 WIB.

¹⁸ Tommy Adityo Murti, Remedial and Recovery Head. *Wawancara Pribadi*. Jumat, 02 Agustus 2019 pukul 15.45 WIB.

jaminan masih menggunakan konsep *rahn*, hal tersebut masih bersifat umum dan hanya berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), hal demikian terjadi akibat belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hal ini, akibatnya adalah pembebanan jaminan (*rahn*) dalam perbankan syariah Indonesia justru menggunakan ketentuan dari KUH Perdata tentang gadai dan hipotek serta Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Fidusia yang notabennya merupakan pengaturan hukum jaminan untuk perbankan konvensional (perjanjian hutang piutang).¹⁹

Sama halnya seperti di Indonesia, di Mesir juga menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah*. Meskipun fiqh tidak mengizinkan pemilik modal/investor untuk menuntut jaminan dari mudharib, dalam kenyataannya, bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan, baik dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Namun mereka menegaskan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak. International Islamic Bank for Investment and Development, misalnya, mempersyaratkan bagi pemohon pendanaan *mudharabah* untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank. Demikian juga, salah satu klausul dalam kontrak *mudharabah* pada Faisal Islamic Bank of Egypt dinyatakan bahwa “jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguh-sungguh melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung kerugian,²⁰ dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini.”²¹

Berangkat dari fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara konsep *mudharabah* dalam fiqh klasik, dengan aplikasinya di perbankan syari’ah, di antaranya mengenai persoalan jaminan yang harus diberikan mudharib kepada pihak shahibul mal dalam hal ini bank syari’ah.

Jaminan syariah dalam prakteknya terbagi menjadi 2 bentuk, pertama adalah *al-rahn* sebagai jaminan kebendaan dan *al-kafalah* yang merupakan jaminan perorangan. Al-rahn

¹⁹ Muhyidin., Shidiq, M, M., & Triyono. (2017).. Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Diponegoro Privat Law Review*, Vol 1(1). Hal. 107

²⁰Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Profit-sharing investment accounts in Islamic banks: Regulatory problems and possible solutions. *Journal of Banking Regulation*, 10(4), 300-306. <https://doi.org/10.1057/jbr.2009.9>

²¹Saeed, A. (2004). *Islamic Banking and Interest: a Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, Maftuhin, A. (penerjemah). Menyoal Bank Syari’ah. Jakarta: Paramadina. Cet. 2, 86.

disini tidak bersifat mutlak harus ada, tetapi lebih mengarah kepada hal yang bersifat tolong menolong. Tolong menolong inilah yang merupakan ciri khas dari konsep Al-rahn atau gadai. Hukum Islam sangat memperhatikan dan menjaga kepentingan shahibul mal dalam pembiayaan mudharabah jangan sampai ia dirugikan. Oleh karena itu shahibul maal diperbolehkan untuk meminta barang sebagai jaminan mudharabah, sehingga apabila mudharib tidak mampu melunasi hutangnya barang jaminan tersebut dapat dijual oleh shahibul maal untuk menyelesaikan kewajiban pada pembiayaan tersebut. Konsep demikian inilah yang dalam fiqh Islam disebut dengan jaminan atau al-rahn.²²

Suatu perjanjian kerjasama dalam Islam memiliki konsep profit-lost sharing, yang artinya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara adil. Akan beda halnya apabila perjanjian itu berupa hutang, maka pihak yang berhutang wajib membayar kembali hutangnya dengan kondisi seperti apapun.²³ Akad mudharabah diartikan bahwa seorang pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha/pengelola modal tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian diluar materi berupa tenaga dan waktu. Mudharib akan diwajibkan menanggung kerugian apabila melanggar perjanjian dan melakukan kelalaian.

Selain itu, tidak ada aturan standar dalam menentukan sebuah kerugian itu merupakan kelalaian dari mudharib atau bukan. Karena sangat jelas, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin gagal dalam berusaha, semua akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh tetapi hanya semangatnya sajalah yang akan mengalami fluktuasi. Ada kekhawatiran setiap kerugian usaha nantinya akan dikatakan sebagai kelalaian mudharib dalam mengelola dana. kalau sudah seperti ini mudharib lah yang akan paling dirugikan, sudah rugi waktu dan tenaga ditambah lagi harus kehilangan aset yang dijaminakan sebagai bentuk pengembalian dana mudharabah. Sehingga tidak ada beda antara sistem [ekonomi](#) Islam dengan ekonomi kapitalis, dimana orang yang memiliki modal besar akan terus berkembang dengan mudah. Dengan kata lain yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Pentingnya pembentukan pelembagaan jaminan syariah karena selama ini jaminan yang ada tidak sesuai dengan akad syariah, misalkan Hak Tanggungan dimana formnya baku

²² Rahman, T. (2009). Islamic Economic & Finance Pedia mudarabah and the pakistan perspective.13.

²³Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35.349 – 358

yang masih ada klausul kredit dan hutang piutang. Sedangkan, dalam syariah tidak dikenal dengan sebutan hutang piutang namun dikenal dengan sebutan pembiayaan. Disini terlihat antara konsep dan implikasinya berbeda. Maka Hak Tanggungan tidak sesuai kalau diletakkan pada akad *mudharabah*. Permasalahan itu akan muncul apabila Hak Tanggungan diletakkan pada akad *mudharabah*. Jadi perikatan jaminannya konvensional dan akadnya syariah, tentu hal tersebut tidak dapat diselaraskan. Harusnya perikatan jaminan pada akad *mudharabah* dibuat dalam konteks syariah, kesulitannya pelebagaan syariah terletak pada regulator yang berwenang merubah itu.²⁴

Hak tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur, oleh karena itu hak tanggungan merupakan perjanjian *accessoir* pada suatu perjanjian yang timbul akibat hubungan hukum utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi, berakhir, dan hapusnya hak tanggungan dengan sendirinya ditentukan oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin pelunasannya. Tanpa ada suatu hutang tertentu yang secara tegas dijamin pelunasannya, maka menurut hukum tidak akan ada hak tanggungan.²⁵

3.2 Konsep pelebagaan jaminan pada akad *Mudharabah*

Kedudukan jaminan kebendaan pada akad *Mudharabah* merupakan jaminan tambahan, jaminan pokoknya adalah berupa tagihan piutang. Dalam hukum jaminan kebendaan tidak diperkenankan pengalihan hak atas benda obyek jaminan kepada kreditur. Jaminan hanya dapat dieksekusi apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Secara jelas Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah*, meskipun *mudharabah* menggunakan kata “*dharaba*” dari akar kata ini menjadi “*mudharabah*”. Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharaba* dengan jelas dalam bentuk *mudharabah* kata. Al-Qur'an menyebutkannya dalam kata *dharaba* sebanyak 58 kali ²⁶ Antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2), ayat 273 :

²⁴Thalis Noor Cahyadi, Pengacara Syariah di Kantor Afta&Brother Yogyakarta. *Wawancara Pribadi*. Sabtu, 09 Maret 2019. Pukul 14.00 WIB.

²⁵Rustam, R. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.188

²⁶Nidaussalam, M. (2016). *Mudharabah as an Islamic Financial Model*. *Shirkah Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1)

“Berinfqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta...”.²⁷

Dengan menggunakan metode takwil dari ayat diatas bahwa *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerjasama yang mengedepankan kepercayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dua orang atau lebih melakukan transaksi dimana kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan saling percaya satu sama lain, maka tidak diperlukan adanya jaminan. Karena akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama, maka prinsip kepercayaan otomatis terdapat dalam transaksi tersebut. Pada ayat diatas disebutkan bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha. Bentuk usaha yang dianjurkan oleh Al-Qur'an menurut ayat tersebut adalah bentuk *mudharabah* atau kemitraan. Dengan menggunakan metode takwil, yaitu mencari makna hakiki pada suatu ayat maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat tersebut mengimplikasikan bahwa *mudharabah* adalah usaha bersama dengan sistem kemitraan, dan apabila dalam kemitraan tidak lah tepat untuk dipersyaratkan adanya jaminan kebendaan.

Al-rahm memberikan ketenangan kepada marhunbith (pemilik uang) dan atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Selain itu, unsur yang penting lainnya timbulnya al-rahm dikarenakan adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya. Jaminan syariah dalam prakteknya terbagi dalam 2 (dua) bentuk, pertama adalah al-rahm (sebagai suatu lembaga) yang merupakan jaminan kebendaan dan al-kafalah yang merupakan jaminan perorangan.

Permasalahan jaminan menjadi kendala sendiri bagi perbankan syariah terkait dengan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syar'i yang menjadi sumber rujukan dalam segala aktivitasnya. Keharusan adanya jaminan terdapat dalam setiap akad pemberian pembiayaan baik menggunakan skema akad *mudharabah*, atau *musyarakah*, atau *murabahah*, atau juga menggunakan gadai (rahm). Hampir dalam setiap bentuk akad pembiayaan yang ada di bank syariah selalu mempersyaratkan adanya barang jaminan.²⁸

Berdasarkan konsideran huruf (c) yang berbunyi *bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional* dan beberapa butir dalam

²⁷Departemen Agama RI.(1979). Al-Qur aan dan Terjemahnya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur'an.

²⁸Annisa Masitha, SME Account Officer. Bank BNI Syariah KC Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Jumat,19 Juli 2019. Pukul 15.30 WIB.

penjelasan umum UU Perbankan Syariah. *Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.* tidak terdapat keraguan mengenai kekhususan perbankan syariah dengan salah satu produk utamanya yaitu pembiayaan syariah, dan hal ini harus diatur dalam UU Perbankan Syariah.

Persoalan kemudian muncul ketika jaminan syariah yang merupakan bagian penting dari pembiayaan syariah tidak diatur sama sekali. Tidak diaturnya jaminan dalam UU Perbankan Syariah menimbulkan kekosongan hukum, maka tidak heran apabila bank syariah menggunakan prosedur jaminan dan lembaga-lembaga jaminan dalam perbankan konvensional yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah secara kafaah dimana pada satu sisi bank syariah menerapkan pembiayaan syariah, namun pada sisi lain masih menggunakan sistem jaminan konvensional untuk melengkapi aturan mengenai jaminannya.

Dalam proses yang demikian Hukum Islam mempunyai peluang yang besar untuk dapat masuk sebagai salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan untuk membina hukum nasional tersebut. Disamping bahan-bahan hukum lainnya seperti yang berasal dari hukum Barat dan hukum adat. Dalam hubungan ini bilamana hukum Islam ingin mendapatkan tempat yang lebih luas dalam kehidupan hukum Nasional yang akan datang ia harus dapat menunjukkan keunggulan-keunggulan komperatifnya dari berbagai hukum yang lainnya. Hal tersebut memberikan gambaran terhadap konstruksi hukum Islam di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional, sehingga hak-hak konstitusional dalam bergama tidak diartikan sebagai makna yang bersifat abstrak, tetapi lebih memberikan makna yang bersifat konkrit melalui hukum formal yang memiliki nilai-nilai materil sebagai dasar dalam penguatan sistem hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional.²⁹

Hukum Islam itu sendiri adalah representasi dari pemikiran Islam, manifestasi paling khas dari pandangan dunia Islam, dan esensi Islam itu sendiri. Hukum Islam adalah contoh

²⁹ Absori & Fathkul Muin. (2015). Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). Al-Risalah. Vol 15 (2). Hal 288.

instruktif dari "hukum ilahi". Hukum ini adalah fenomena yang sangat berbeda dari semua bentuk hukum yang, bagaimanapun, tentu tidak selalu memimpin dan menentukan.³⁰

Dalam konsep hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang digunakan di Indonesia, al-rah'n/jaminan syariah dapat dianalogkan sebagai perjanjian 'accessoir' atau perjanjian ikutan (tambahan). Sebagai konsep hukum jaminan, al-rah'n dapat dianalogkan sebagai lembaga jaminan, sebagaimana lembaga jaminan konvensional lain yang juga merupakan perjanjian 'accessoir', yaitu hak tanggungan, fidusia dan gadai.

Keberadaan jaminan kebendaan sudah diadopsi oleh bank konvensional sebagai salah satu syarat utama dikeluarkannya kredit. Akan tetapi pada konsep perbankan syariah sudah seharusnya konsep mengenai jaminan kebendaan ini mulai dikurangi porsi, karena pada dasarnya penggunaan jaminan kebendaan akan sesuai ketika yang digunakan adalah perjanjian hutang piutang. Sedangkan yang kita bicarakan disini adalah akad berbasis kerjasama berdasar pada kepercayaan pada mitranya. Akan sangat tidak sesuai ketika akadnya adalah kerjasama tapi masih menjadikan jaminan kebendaan sebagai salah satu syarat utama untuk dikeluarkan pembiayaan tersebut.

3.3 Sudut pandang oleh praktisi Bank Syariah

Menurut Tommy Adityo Murti³¹ sesuai Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa bank syariah menjamin dana nasabah dari kerugian, bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah (apapun akad dan produknya) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan pihak bank syariah yang membayar preminya. Apabila terjadi kerugian atau pailit pada pihak bank syariah, maka Lembaga Penjamin Simpanan yang mengganti semua dana simpanan nasabah (maksimal Rp 2 milyar).

Menurut beliau, Bank Syariah selalu membebankan jaminan pada tiap pembiayaan salah satunya mudharabah. Prosedur dalam pembebanan jaminan sama dengan prosedur pembebanan jaminan pada bank konvensional. Perbedaan keduanya hanya terletak pada istilah penyebutan perjanjiannya saja, istilah kredit pada bank konvensional dan perjanjian penyertaan modal istilah pada bank syariah.

³⁰ Absori, Aidul Fitriciada Azhari, M Muinudinillah Basri, & Fatkhul Muin. (2016). Transformation Of Maqâshid Al-Syarî'ah (An Overview Of The Development Of Islamic Law In Indonesia). Al-Ihkam. Vol 11 (1). Hal 8.

³¹ Tommy Adityo Murti, Remedial and Recovery Head. *Wawancara Pribadi*. Sabtu, 04 Januari 2020 pukul 14.30 WIB

Belum adanya pengaturan yang khusus terhadap pembebanan jaminan pada akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia, menyebabkan digunakannya peraturan perundang-undangan yang sama dengan pembebanan jaminan pada perjanjian kredit di perbankan konvensional, yaitu menggunakan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan yang sejatinya digunakan pada pokok perjanjian hutang-piutang. Penggunaan peraturan tersebut tentunya tidak adanya pembeda antara praktik perbankan syariah dengan perbankan yang bersistem ribawi.

3.4 Sudut pandang dari Pengacara Syariah

Menurut Thalys Noor Cahyadi³², sebagai pengacara syariah yang pernah menangani kasus di perbankan syariah menyatakan, tidak ada perbedaan secara khusus antara pembebanan jaminan di perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya hanya terletak pada istilah penyebutan perjanjiannya saja. Dalam pembebanan jaminan syariah disebut dengan istilah pembebanan jaminan pada pembiayaan akad mudharabah, yang mana pihak bank syariah selaku shahibul mal dan pihak nasabah selaku mudharib.

Secara teknis, pengikatan jaminan syariah juga tidak berbeda dengan perbankan konvensional, karena peraturan yang digunakan pada bank syariah yaitu menggunakan ketentuan dari KUH Perdata tentang Gadai dan Hipotek serta Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia yang notabennya merupakan peraturan hukum jaminan untuk perbankan konvensional dengan klausul hutang piutang. Hal ini disebabkan belum adanya aturan secara khusus mengenai jaminan syariah yang digunakan pada perbankan syariah khususnya pada akad Mudharabah. Secara praktek dapat disimpulkan bahwa tidak berbeda antara pembebanan an perikatan jaminan di perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Pandangan hukum positif mengenai pembebanan jaminan pada akad mudharabah di perbankan syariah adalah bahwa pengaturan yang ada terkait dengan pembebanan jaminan masih menggunakan konsep *rahn*, hal tersebut masih bersifat umum dan hanya berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal demikian terjadi akibat belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hal ini, akibatnya adalah pembebanan jaminan (*rahn*) dalam perbankan syariah justru menggunakan ketentuan

³² Thalys Noor Cahyadi, Pengacara Syariah di Kantor Afta&Brother Yogyakarta. *Wawancara Pribadi*. Sabtu, 09 Maret 2019. Pukul 14.20 WIB.

dari KUH Perdata tentang Gadai dan Hipotek serta Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Fidusia yang merupakan pengaturan hukum jaminan untuk perbankan konvensional. Sementara pandangan hukum Islam mengenai pembebanan jaminan pada akad mudharabah di perbankan syariah adalah hukumnya haram. Karena pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari para ulama tentang haramnya pembedaan jaminan pada akad mudharabah. Persyaratan pembebanan jaminan ini membuat akad mudharabah menjadi rusak dan diragukan keabsahannya.³³

Dalam hal perlindungan modal, semua cendekiawan klasik secara kolektif menyetujui larangan skema jaminan untuk *mudarabah* (bagi hasil) karena tidak relevan dengan usaha *mudarabah* (kerjasama). Karena *mudarabah* beroperasi di bawah skema bagi hasil dan bukan pinjaman, maka agunan dan jaminan tidak diperlukan. Gagasan memberikan jaminan pada *mudarabah* kontrak (bagi hasil) menyimpang dari filosofi dasar laba, bagi hasil, yaitu *al-ghorm bil ghoram* (tidak ada imbalan tanpa risiko).³⁴

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi hukum jaminan yang sekarang ada khusus untuk akad mudharabah, dimana terdapat dua konstruksi jaminan bukan kebendaan yang bisa diaplikasikan dengan segala kekurangan dan kelebihan. *Pertama* adalah mulai dikenalkannya jaminan berupa asuransi untuk dapat menjamin dikembalikan pembiayaan tersebut, dengan pembayaran asuransi pembiayaan yang diperbesar dan porsi jaminan kebendaan dikurangi dan diikat juga dengan asuransi maka keberadaan jaminan kebendaan menjadi tidak terlalu diperhitungkan sebagai salah satu syarat diperolehnya pembiayaan tersebut.

Kelebihan konsep ini adalah calon mudharib yang memiliki proposal kerjasama yang feasible akan dapat mengajukan tawaran pembiayaan mudharabah tanpa memerlukan jaminan kebendaan. Dari sisi bank syariah pun risiko dari pembiayaan ini juga tidak akan terlalu besar, karena setiap risiko yang mungkin muncul dikemudian hari akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga relatif aman bagi bank syariah. Akan tetapi kekurangan dari konsep ini adalah pembayaran asuransi menjadi sangat besar dan ini akan memberatkan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. Sehingga produk mudharabah bisa jadi

³³ Muhyidin., Shidiq, M, M., & Triyono. (2017).. Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Diponegoro Privat Law Review*, Vol 1(1). Hal 120

³⁴Rosly, S. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking & Finance, Investment, Takaful and Financial Planning. Dinamas Publication,.

menjadi sangat mahal dan tidak akan dapat bersaing dengan produk kredit pada bank konvensional.

Jaminan asuransi tersebut sudah mulai di aplikasikan pada bank syariah di Malaysia sejak tahun 2005 ketika Bank Negara Malaysia (BNM) menyetujui Credit Guarantee Corporation Berhad (CGC) sebagai penjamin pihak ketiga untuk usaha bisnis dengan penerapan Skema Jaminan Akses Langsung Islam (DAGS-i). Dalam skema ini, penjamin akan membebaskan biaya untuk layanan jaminan yang diberikan secara eksklusif untuk produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pelanggan mereka (BNM, 2008).³⁵

Selain itu bisa dengan cara *kedua* yaitu dengan cara menggunakan konsep seperti pembiayaan berbasis modal ventura dimana bank memiliki peran yang hampir sama dengan perusahaan modal venturan dan mudharib atau nasabah memiliki fungsi seperti perusahaan pasangan usaha. Dimana disini bank selain menyediakan modal berupa dana yang akan diusahakan oleh mudharib juga memberikan pendampingan kepada mudharib.

Apabila faktor kehati-hatian menjadi alasan maka prinsip saling percaya (amanah) pada akad mudharabah telah hilang dengan dipersyaratkannya jaminan. Untuk menjalankan prinsip kehati-hatian Lembaga Keuangan baik yang konvensional maupun syariah pasti memiliki upaya preventif dan represif untuk meminimalkan risiko. Seperti salah satunya melakukan seleksi untuk persetujuan pembiayaan, bisa itu dengan cara melihat track record dari mudharib dan juga melihat prospek kedepan dari proposal bisnis yang diajukan mudharib.

Pada saat pengajuan pembiayaan mudharabah telah disetujui dan usaha berjalan, pihak bank bisa melakukan kontrol rutin untuk mengawal dan memberikan masukan-masukan kepada mudharib. Terlebih mengenai isu-isu ekonomi yang terjadi sudah pasti bank memiliki info yang lebih akurat dibanding masyarakat awam. Dengan demikian kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh mudharib selaku pengelola dana dapat diminimalkan. Dan apabila terjadi kesalahan dalam praktik usaha di lapangan, pihak bank bisa cepat mengetahui permasalahan dan tanggap memberikan solusi yang tepat.

³⁵ Shofawati, A. (2014). Murabahah financing in Islamic banking: Case study in Indonesia. Paper presented at the Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference 17–18, Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia.

Jika semua prosedur dilakukan secara rapi dan teliti maka kemungkinan untuk terjadi kerugian pun akan kecil. Mudharib tidak akan terbebani dengan kekhawatiran akan kehilangan aset sebagai jaminan. Dan apabila kerugian pada usaha benar-benar tidak dapat dihindari lagi hingga usaha yang dijalankan mudharib dinyatakan bangkrut, pihak bank sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian dari mudharib.

Kelebihan konsep ini adalah segala bentuk penyimpangan atau perkembangan usaha yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi sehingga tujuan pembiayaan modal ventura yaitu terciptanya kerjasama berbasis kemitraan akan tercapai. Akan tetapi bentuk kedua ini juga memiliki kekurangan berupa dalam bentuk modal ventura maka dana yang dimasukkan dalam partnership tersebut haruslah berbentuk penyertaan modal. Sedangkan dalam perbankan dana yang dimasukkan dalam bentuk dana tunai. Dan juga perbankan memiliki keterbatasan berupa personnel yang akan ditempatkan untuk mengawasi proses usaha yang dijalankan oleh mudharib.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Terjadinya *mudharabah* apabila pemilik modal (shahibul maal) sudah percaya pada orang yang akan mengelola modalnya itu (mudharib). Akan tetapi berdasar hasil penelitian bahwa bank syariah di Indonesia masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pemberian pembiayaannya, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Tidak akan sesuai apabila transaksi pembiayaan berbasis syariah akan tetapi jaminan yang merupakan perjanjian tambahannya berbasis jaminan konvensional.
- b. Konsep jaminan *Mudharabah* dapat dirumuskan menggunakan dua opsi. Opsi pertama adalah menggunakan jaminan berupa asuransi, dimana fix asset hanya merupakan jaminan tambahan jaminan utamanya adalah asuransi tersebut. Opsi kedua adalah dengan menggunakan pendekatan berbentuk partnership dimana bank syariah sebagai shahibul maal selain menyediakan dana juga memberikan pendampingan manajemen bagi mudharib, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh mudharib akan dapat terpantau sehingga dapat menghindarkan adanya kerugian usaha yang mungkin terjadi.

4.2 Saran

- a. Mengharapkan pihak shahibul mal melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan pembedaan. Dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan mudharabah adalah saling percaya. Dan peran pihak shahibul mal dalam penerapan jaminan kebendaan menurut hukum islam harus diterapkan sesuai dengan pedoman al-qur'an maupun al-hadist serta ketentuan hukum syariah itu sendiri, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindari resiko kerugian bank.
- b. pendekatan personal perlu dilaksanakan sesuai dengan konsep *taawun* atau tolong menolong dalam kebaikan. Berangkat dari konsep tersebut maka pemberian pembiayaan dan pemberlakuan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* bisa diberlakukan meskipun jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi. Dalam konsep jaminan syariah ini konsep *taawun* perlu dikedepankan dan juga konsep *know your konsumen* dengan pendekatan personal perlu ditekankan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul pada pembiayaan tersebut. Pendekatan personal ini bisa dilakukan ketika terdapat tanda-tanda bahwa nasabah mengalami kesulitan membayar maka pihak bank perlu proaktif secara personal untuk melakukan pendekatan dan mencoba mencari solusi bersama atas kesulitan nasabah tersebut. Sehingga konsep pelembagaan jaminan syariah ini sifatnya lebih komprehensif dibanding jaminan konvensional..

DAFTAR PUSTAKA

- Absori & Fathkul Muin. (2015). Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). Al-Risalah. Vol 15 (2).
- Absori, Aidul Fitriciada Azhari, M Muinudinillah Basri, & Fatkhul Muin. (2016). Transformation Of Maqâshid Al-Syarî'ah (An Overview Of The Development Of Islamic Law In Indonesia). Al-Ihkam. Vol 11 (1)..
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Profit-sharing investment accounts in Islamic banks: Regulatory problems and possible solutions. *Journal of Banking Regulation*, 10(4), 300-306. <https://doi.org/10.1057/jbr.2009.9>
- Departemen Agama RI.(1979). Al-Qur aan dan Terjemahnya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur'an.

- Faris, S. (2018). Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern). XVII(1), 12.
<http://www.iec-febui.com/mudharabah-sebuah-dilema/> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 08.06 WIB.
- <https://www.dakwatuna.com/2014/04/16/49721/mengapa-pembiayaan-mudharabah-kurang-dilirik-perbankan-syariah/amp/> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 07.55 WIB.
- Hulam, T. (2010). Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. Jurnal mimbar hukum. XXII(3)
- Ismail, R. (2014). An Optimal Risk-return portofolio of Islamic banks. *Humanomics*, Vol 30 Iss 4
- Muhaimin, S. (2018). Teknik Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhyidin., Shidiq, M, M., & Triyono. (2017).. Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Diponegoro Privat Law Review*, Vol 1(1).
- Nidaussalam, M. (2016). Mudharabah as an Islamic Financial Model. *Shirkah Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(1)
- Rahman, T. (2009). Islamic Economic & Finance Pedia mudarabah and the pakistan perspective.13.
- Rosly, S. (2005). Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking & Finance, Investment, Takaful and Financial Planning. Dinamas Publication,.
- Rustam, R. (2017). Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press.188
- Saeed, A. (2004). Islamic Banking and Interest: a Study of Riba And Its Contemporary Interpretation, Maftuhin, A. (penerjemah). Menyoal Bank Syari'ah.Jakarta: Paramadina. Cet. 2.
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35.
- Shaharuddin, A. (2010). A study on Mudarabah in Islamic law and its application in Malaysian Islamic banks.

- Shaikh., & Ahmed, S. (2011). A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking & Finance*. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1930173>
- Shofawati, A. (2014). Murabahah financing in Islamic banking: Case study in Indonesia. Paper presented at the Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference 17–18, Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Sidang terbuka Mhd. Yadi Harahap, Doktor FH UI. <http://law.ui.ac.id> diakses pada hari Jumat, 03 Januari 2020 pukul 08.31 WIB.
- UU No. 21/ 2018 tentang perbankan syariah
- Zain, M. N. M., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., Zakaria, Z., & Ghani, N. A. R. N. A. (2014). Gold Investment Application through Mudarabah Instruments in Malaysia: Analysis of Gold Dinar as Capital. *Asian Social Science*, 10(7).
- Zainol, Z., & Kassim, S. (2012). A critical review of the literature on the rate of return risk in Islamic banks, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2).